

BAB II

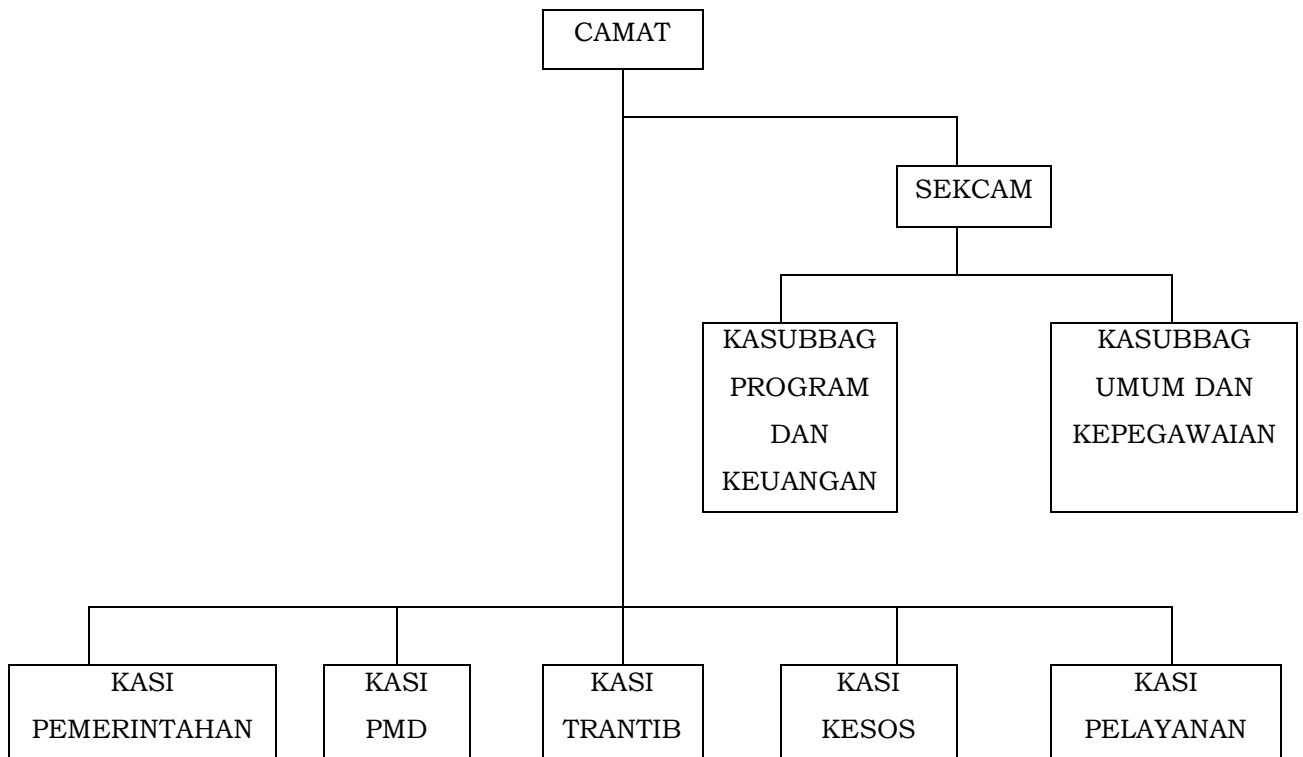
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan

2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, susunan organisasi Kecamatan Juwana terdiri atas:

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
KANTOR KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI



Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Juwana

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;

- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Di Kabupaten Pati, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel II.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati. - Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di Wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
2	Aspek Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek	<ul style="list-style-type: none"> - Melantik keanggotaan Badan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
	Penyelenggaraan	<p>Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. - Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel II.2.

Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro, Pengumpulan Dana dan penutupan jalan.
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Sekretariat Kecamatan Juwana, 2017

2.2 Sumber Daya Kecamatan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Juwana berjumlah 44 orang, terdiri dari 39 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 orang Tenaga Harian Lepas (THL).

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Juwana	2		4	2	24	11	44	100
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	2,27
	- Sekcam	1						1	2,27
	- Kasubag Program & Keu				1			1	2,27
	- Kasubag Umum & Kepeg			1				1	2,27
	- Kasi PMD				1			1	2,27
	- Kasi Trantib			1				1	2,27
	- Kasi Kesos			1				1	2,27
	- Kasi Pelayanan							1	2,27
	- Kasi Pemerintahan			1				1	2,27
	- Staf Pemerintahan					18	5	23	52,27
	- Staf PMD					1	1	2	4,54
	- Staf Kesos					1	1	2	4,54
	- Staf Subbag Umum & Kep						1	1	2,27
	- Staf Subbag Program & Keu					1	1	2	4,54
	- Pegawai Non PNS					3	2	5	11,36

Sumber: Sekretariat Kecamatan Juwana, 2017

Tabel II.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2<		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Juwana			23	9			8	4	2		31	13
	- Camat							1				1	-
	- Sekcam									1		1	
	-Kasubag Program & Keu								1				1
	-Kasubag Umum & Kepeg							1				1	-
	- Kasi PMD								1				1
	- Kasi Trantib							1				1	-
	- Kasi Kesos									1		1	-
	-Kasi Pelayanan							1				1	-
	-Kasi Pemerintahan							1				1	-
	-Staf Pemerintahan			18	5				1			19	5
	-Staf PMD			1	1							1	1
	-Staf Kesos			1	1							1	1
	-Staf Subbag Umum & Kep				1							-	1
	- Staf Subbag Program & Keu			1				1				2	-
	- Pegawai Non PNS			2	1			1	1			3	2

Sumber: Sekretariat Kecamatan Juwana, 2017

Tabel II.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Juwana	3	-	7	5	19	7	3	2	12	8
	- Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Program & Keu	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi PMD	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Pelayanan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Pemerintahan	-	-	1	1	17	5	1	1	19	7
	- Staf PMD	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1
	- Staf Pelayanan	-	-	-	1	-	-	2	-	1	2
	- Staf kesos	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Staf Subbag Program dan Keuangan	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1

Sumber: Sekretariat Kecamatan Juwana, 2017

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel II.6
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	Gedung	2	Unit	Baik	
2	Ruangan	8	Ruangan	Baik	
3	Kendaraan roda 4	1	Unit	Baik	2012
4	Kendaraan roda 2	5	Unit	4 Baik, 1 kurang baik	
	peralatan kerja :		Unit		
5	- Komputer	6	Unit	4 baik, 2 kurang baik	
6	- Laptop	3	Unit	1 baik, 2 kurang baik	
7	- Printer	4	Unit	1 baik, 2 kurang baik, 1 rusak	
8	- Meja	30	Unit	Baik	
9	- Kursi	24	Unit	20 Baik, 4 kurang baik	
10	- AC	1	Unit	Baik	
11	- Almari	3	Unit	2 baik, 1 kurang baik	
12	- Filling cabinet	2	Unit	Baik	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Juwana, 2017

Mengingat jumlah aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang dan petugas PBB 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 6 unit termasuk mobil, keadaan sepeda motor 1 kurang baik maka kedepan pemerintah kecamatan masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sebanyak 5 unit dikarenakan 4 unit motor untuk pejabat yang belum dapat motor dan 1 unit motor untuk penggantian motor yang sudah kurang baik.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Juwana saat ini sebanyak 6 unit dengan 3 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik, maka ke

depan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 3 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian komputer yang kurang baik.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Juwana saat ini sebanyak 3 unit dengan 1 dalam kondisi baik dan 2 kondisi kurang baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 2 untuk simda keuangan dan simda BMD (aset) maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 9 unit lagi untuk 9 pejabat dan penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Juwana saat ini sebanyak 4 unit dengan 1 dalam kondisi baik, 2 kondisi kurang baik dan 1 kondisi rusak, maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 10 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Juwana saat ini sebanyak 30 unit dengan dalam kondisi baik. Untuk kedepan masih membutuhkan meja computer sebanyak 2 unit untuk pelayanan.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Juwana saat ini sebanyak 24 unit dengan 22 dalam kondisi baik dan 2 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 2 unit untuk penggantian kursi pejabat yang kurang baik, dan perlu penambahan kursi tamu sebanyak 10 unit, kursi rapat 50 unit untuk pelayanan dan penggantian kursi yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Juwana saat ini sebanyak 1 unit dengan kondisi baik, , maka ke depan masih membutuhkan penambahan AC sebanyak 7 unit lagi untuk 7 ruangan yang belum terdapat AC.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Juwana saat ini sebanyak 3 unit dengan 2 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 3 unit lagi untuk tempat arsip, penggantian almari yang kurang baik dan rusak.

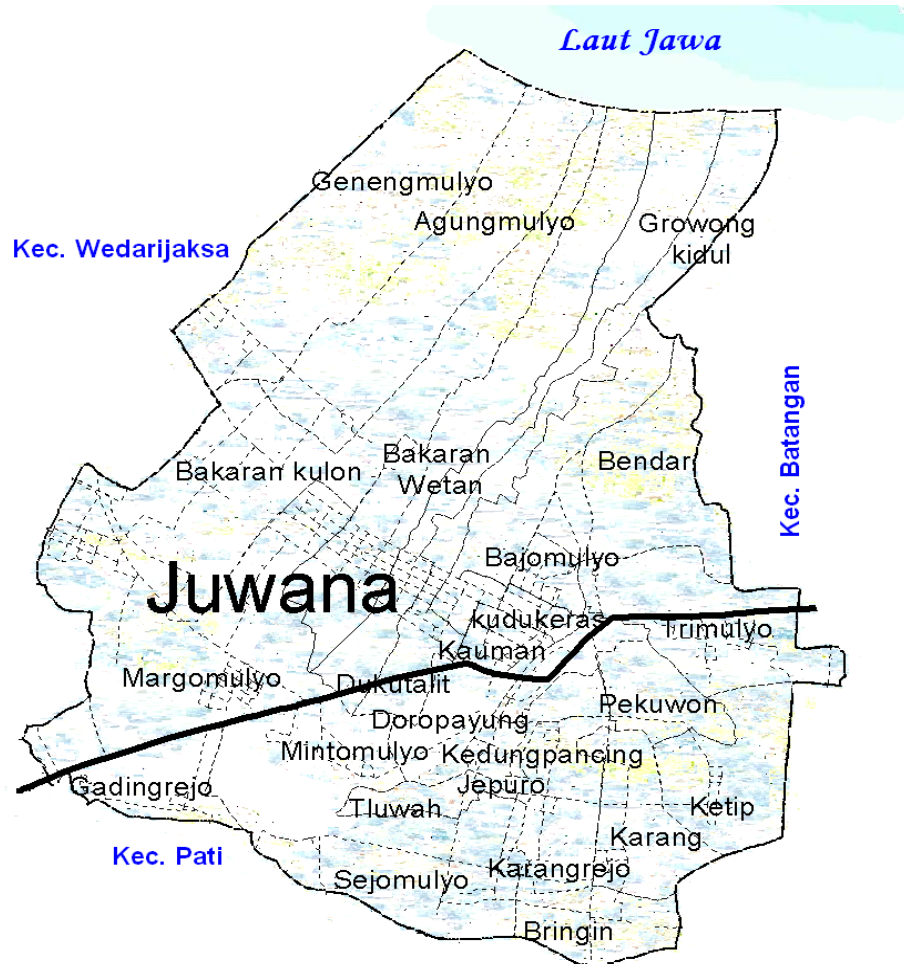
Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan Juwana saat ini sebanyak 2 unit dengan dalam . Untuk ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 9 unit lagi untuk pejabat struktural yang belum punya filling cabinet dan penggantian filling cabinet yang kurang baik dan rusak.

2.2.3. Kondisi Umum Kecamatan Juwana

2.2.3.1. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Juwana merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 5.407 Ha. Secara administratif Kecamatan Juwana dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati
- Bagian Utara : Laut Jawa
- Bagian Timur : Kecamatan Batangan Kabupaten Pati
- Bagian Barat : Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati



Peta Kecamatan Juwana

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Juwana dapat dilihat dalam tabel II.6 berikut ini :

Tabel II.7
Kawasan Perencanaan di Lingkup Kecamatan Juwana

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW	Peruntukan Kawasan Pengembangan Khusus menurut RTRW Kab. Pati
1	Sejomulyo	356	19	3	
2	Bringin	175	10	2	
3	Ketip	123	13	4	
4	Pekuwon	113	11	2	
5	Karang	199	18	3	
6	Karangrejo	228	20	5	
7	Bumirejo	29	6	1	
8	Kedungpancing	12	3	1	
9	Jepuro	9	2	1	
10	Tluwah	45	3	1	
11	Doropayung	26	9	3	
12	Mintomulyo	235	10	4	
13	Gadingrejo	209	11	4	
14	Margomulyo	375	19	3	
15	Langgenharjo	637	29	4	
16	Genengmulyo	293	13	6	
17	Agungmulyo	225	9	2	
18	Bakaran Kulon	453	16	5	
19	Bakaran Wetan	570	12	3	
20	Dukutalit	90	15	3	
21	Growongf Kidul	238	17	4	
22	Growong Lor	154	21	3	
23	Kauman	18	12	3	
24	Pajeksan	16	8	2	
25	Kudukeras	20	12	3	

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW	Peruntukan Kawasan Pengembangan Khusus menurut RTRW Kab. Pati
26	Kebonsawahan	20	5	1	
27	Bajomulyo	71	16	4	
28	Bendar	180	15	5	
29	Trimulyo	472	17	4	

Sumber: Kecamatan Juwana dalam angka 2016

2.2.3.2. Keadaan penduduk

Kecamatan Juwana memiliki jumlah penduduk sebanyak 95.597 jiwa, yang terdiri dari 47.225 jiwa laki-laki dan 48.372 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Juwana tahun 2016 berjumlah 49.947 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2016 yang dilihat kepadatan penduduk sebesar 1,709 jiwa per hektar. Profil kependudukan Kecamatan Juwana digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel II.8

Jumlah Penduduk menurut Struktur Umur di Kecamatan Juwana

No	Kelompok Umur	L	%	P	%	jumlah	%
1	0-4	3.904	51,0	3.749	49,0	7.653	100
2	5-9	4.106	51.4	3.877	48.6	7.983	100
3	10-14	3.562	52.0	3.284	48.0	6.846	100
4	15-19	3.411	50.6	3.329	49.4	6.740	100
5	20-24	3.730	51.0	3.584	49.0	7.314	100
6	25-29	3.717	49.9	3.728	58.1	7.445	100
7.	30-34	3.771	48.4	4.013	51.6	7.784	100
8	35-39	3.844	49.7	3.971	50.3	7.815	100
9	40-44	3.502	49.3	3.606	58.7	7.108	100
10	45-49	3.344	49.8	3.367	50.2	6.711	100
11	50-54	3.023	48.7	3.188	51.3	6.211	100
12	55-59	2.408	49.2	2.489	50.8	4.897	100
13	60-64	1.772	48.9	1.851	51.1	3.623	100

No	Kelompok Umur	L	%	P	%	jumlah	%
14	65-69	1.219	46.5	1.402	53.5	2.621	100
15	70-74	855	42.3	1.168	57.7	2.023	100
16	75+	1.057	37.4	1.766	62.6	2.823	100

Sumber: Kecamatan Juwana dalam angka 2016

Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Juwana sebagai berikut :

Tabel II.9

Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kecamatan Juwana

No	Pendidikan	L	P	jumlah	%
1	Belum sekolah	9.862	10.049	19.911	21,25%
2	Belum tamat SD/MI	5.891	5.802	11.693	12,48%
3	SD/MI	14.810	14.638	29.448	31,43%
No	Pendidikan	L	P	jumlah	%
4	SMP/MTs	6.999	7.110	14.109	15,06%
5	SMA/SMK/MA	7.544	7.237	14.781	15,78%
6	DI/DII	107	178	285	0,30%
7	DIII	508	618	1.126	1,20%
8	S1	1.066	1.191	2.257	2,41%
9	S2	42	32	74	0,08%
10	S3	3	2	5	0,01%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2016

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Juwana sebagai berikut

Tabel II.10

Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Juwana

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	10.311	10.265	20.576	21,96%
2	Mengurus rumah tangga	4	16.073	16.077	17,16%

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
3	Pelajar/mahasiswa	8.224	6.681	14.905	15,91%
4	Pensiunan	148	107	255	0,27%
5	PNS	337	340	677	0,72%
6	TNI	34	1	35	0,04%
7	Polri	102	2	104	0,11%
8	Pedagang	243	377	620	0,66%
9	Petani/pekebun	3.002	1.847	4.849	5,18%
10	Peternak	6	2	8	0,01%
11	Nelayan	2.836	13	2.849	0,06%
12	Industri	49	11	60	0,06%
13	Konstruksi	6	0	6	0,01%
14	Transportasi	68	0	68	0,07%
15	Karyawan swasta	6.232	3.173	9.405	10,04%
16	Karyawan BUMN	52	21	73	0,08%
17	Karyawan BUMD	19	7	26	0,03%
18	Karyawan Honorer	63	76	139	0,15%
19	Buruh harian lepas	4.235	1.779	6.014	6,42%
20	Buruh tani	754	480	1.234	1,32%
21	Wiraswasta	6.766	2.771	9.537	10,18%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2016

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Juwana sebagai berikut:

Tabel II.11

Profil Penduduk menurut Jenis Agama di Kecamatan Juwana

No	Agama	L	P	jumlah	%
1	Islam	44.233	44.125	88.358	94,31%
2	Kristen	1.936	2.059	3.995	4,26%
3	Katolik	280	307	587	0,63%
4	Hindu	11	8	19	0,02%
5	Budha	347	348	695	0,74%
6	Konghuchu	0	1	1	0,00%
7	Aliran Kepercayaan	25	9	34	0,04%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2016

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

2.3.1. Kinerja Pelayanan

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 221 dan pasal 226, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 50 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan: koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati, yang menjadi batasan area pengukuran kinerja pelayanan kecamatan. Kewenangan kecamatan juga ditambahkan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Dengan demikian kinerja pelayanan Kecamatan Juwana didasarkan pada tugas dan fungsi dan pelimpahan kewenangan tersebut.

A. Mewujudkan masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan

1. Angka Kriminalitas

Salah satu tugas kecamatan yaitu mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum. Terkait dengan angka kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Juwana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.12

Angka Kriminalitas di Kecamatan Juwana

No	Jenis Kriminal	2013	2014	2015	2016	2017
	Jumlah kasus narkoba	na	0	0	0	0
	Jumlah kasus pembunuhan	na	0	0	0	0
	Jumlah kejahatan seksual	na	0	0	0	0
	Jumlah kasus penganiayaan	na	14	14	5	5

No	Jenis Kriminal	2013	2014	2015	2016	2017
	Jumlah kasus pencurian	na	40	29	27	20
	Jumlah kasus penipuan	na	4	6	4	4
	Jumlah kasus pemalsuan uang	na	0	0	0	0
	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	na	58	49	36	29
	Jumlah penduduk	na	93.876	92.992	95.597	95.597
	Angka kriminalitas (8)/(9)	na	6.18	5,27	3,76	3,03

(Rumus Angka Kriminalitas: jumlah tindak criminal selama setahun dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000)

2. Posko Keamanan Lingkungan (Poskamling).

Terkait dengan ketersediaan Posko Keamanan Lingkungan (Poskamling) di Kecamatan Juwana dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel II.13
Data Poskamling di Kecamatan Juwana

No	Desa	Poskamling		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Sejomulyo	5	0	5
2	Bringin			0
3	Ketip			0
4	Pekuwon	2		2
5	Karang		3	3
6	Karangrejo		20	20
7	Bumirejo		2	2
8	Kedungpancing		3	3
9	Jepuro	1	1	2
10	Tluwah	2	3	5
11	Doropayung	2	3	5

12	Mintomulyo		1	1
13	Gadingrejo	2		2
14	Margomulyo	3		3
15	Langgenharjo		4	4
16	Genengmulyo	3	3	6
17	Agungmulyo	2	3	5
18	Bakaran Kulon		6	6
19	Bakaran Wetan		1	1
20	Dukutalit			0
21	Growong Kidul		3	3
22	Growong Lor	10	11	21
23	Kauman		3	3
24	Pajeksan		3	3
25	Kudukeras			4
26	Kebonsawahan	6		6
27	Bajomulyo	2	5	7
28	Bendar			0
29	Trimulyo	4	8	12
	Jumlah	44	86	130

3. Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Terkait dengan keberadaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kecamatan Juwana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.14
Data Anggota Linmas di Kecamatan Juwana

No	Desa	Linmas		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Sejomulyo	18		18
2	Bringin	10		10
3	Ketip	16		16
4	Pekuwon	14		14
5	Karang	21		21
6	Karangrejo	22		22
7	Bumirejo	15		15

8	Kedungpancing	7	3	10
9	Jepuro	5		5
10	Tluwah	6		6
11	Doropayung	21		21
12	Mintomulyo	11		11
13	Gadingrejo	22		22
14	Margomulyo	18		18
15	Langgenharjo	22		22
16	Genengmulyo	13		13
17	Agungmulyo	20		20
18	Bakaran Kulon	20		20
19	Bakaran Wetan	31		31
20	Dukutalit	20		20
21	Growongf Kidul	26		26
22	Growong Lor	34		34
23	Kauman	20		20
24	Pajeksan	10		10
25	Kudukeras	15	5	20
26	Kebonsawahan	4		4
27	Bajomulyo	28		28
28	Bendar	19		19
29	Trimulyo	32		32
	Jumlah	520	8	528

Evaluasi capaian kinerja pelayanan kecamatan Juwana periode 2013-2017 sebagai berikut.

Tabel II.15
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JUWANA
KABUPATEN PATI

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Angka Kriminalitas		5		7	7	6	6	5	6,70	6,18	5,27	3,76	3,03	0,96	0,88	0,88	0,63	0,61
2	Jumlah pos kampling aktif dibagi jumlah pos kampling yang ada x 100%		50		30	35	35	40	50	28	28	30	30	34	0,93	0,80	0,86	0,75	0,68
3	Jumlah anggota Linmas aktif dibagi jumlah anggota Linmas yang ada x 100%		100		83	84	85	90	100	75	80	80	85	98	0,90	0,95	0,94	0,94	0,98
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi		20		20	20	25	30	35	20	20	25	25	30	1,00	1,00	1,00	0,83	0,85
5	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6	Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten		3,8		3,5	4	5	5	6	3	3,8	3,5	4	4	0,86	0,83	0,70	0,80	0,67
7	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif		60		55	58	59	60	60	52	53	55	57	59	0,95	0,91	0,93	0,95	0,98
8	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
9	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten		50		40	40	40	50	50	32	34	36	38	40	0,80	0,85	0,90	0,76	0,80
10	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan		3,3		2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	2,8	2,8	2,9	3,0	3,1	0,97	0,93	0,94	0,94	0,94
11	Persentase Realisasi Capaian RKPDes		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	78	1,00	1,00	1,00	1,00	0,78
13	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan		75		72	74	75	73	75	67	68	69	70	70	0,94	0,94	0,95	0,95	0,93
15	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib		85		80	81	82	83	85	79	80	81	82	83	0,99	0,99	0,99	0,99	0,98

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Juwana sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2012 sampai dengan 2016 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Juwana sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.16.

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JUWANA
KABUPATEN PATI**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penataan Administrasi Kependudukan	89.840	89.840	89.840	89.840	89.840	89.840	82.320	74.960	73.870	1.880	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,37	-1,67	-33,96
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	12.000	15.000	40.000	40.000	45000	12.000	13.450	36.224	36.134	42.870	25,00	166,67	0,00	12,50	12,08	43,25	52,06
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/wakil Kepala daerah	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	-100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	40.000	40.000	55.000	35000	0	34.000	34.000	51.717	29.540	#DIV/0!	0,00	37,50	-36,36	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	4.320	6.000	0	0	0	4.320	5.280	0	0	0	38,89	-100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	22,22	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan Kulaitas Hidup dan Perlindungan perempuan	0	0	8.000	8.000	10000	0	0	6.400	6.400	36.134	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	25,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	14.500	30.000	18.000	18.000	12000	14.500	25.903	16.500	9.175	0	106,90	-40,00	0,00	-33,33	78,64	22,44	-13,64

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	0	0	3.000	5.000	6000	0	0	2.000	3.000	51.717	#DIV/0!	#DIV/0!	66,67	20,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian KDH	0	0	4.000	8.000	4000	0	0	2.892	7.244	0	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	-50,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	0	0	15.000	0	0	0	0	10.528	0	6.400	#DIV/0!	#DIV/0!	-100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	0	16.000	17.000	18.500	18500	0	14.775	14.517	18.048	9.175	#DIV/0!	6,25	8,82	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Publik	0	18.000	18.000	18000	25000	0	15.000	15.560	0	3.000	#DIV/0!	0,00	0,00	38,89	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Non Urusan																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	130.000	135.000	145.000	152000	205800	122.032	130.167	140.429	147644	199738	3,85	7,41	4,83	35,39	7	11,63	12,84
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	65.000	40.000	105.000	78.000	80000	64.340	34.340	100.040	74.313	77.880	-38,46	162,50	-25,71	2,56	(47)	10,85	37,61
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.000	20.000	20.000	25.000	20000	15.300	15.000	17.500	21.400	18.800	0,00	0,00	25,00	-20,00	(2)	0,61	6,42

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	n	si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.000	4.000	6.500	6.500	10000	3.000	3.000	5.700	3.780	7.036	0,00	62,50	0,00	53,85	-	23,27	35,82

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Tantangan pengembangan pelayanan kecamatan Juwana merujuk pada tugas fungsi utama kecamatan yaitu koordinasi (i) penyelenggaraan pemerintahan, (ii) pelayanan publik, dan (iii) pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Juwana kurun 2012-2017, maka tantangan pengembangan ke arah lima tahun yang akan datang (2017-2022) seagai berikut.

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Tantangan dalam memberikan rasa aman dalam hal ini menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pengembangan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Keberadaan lembaga posko keamanan lingkungan (Poskamling) yang selama ini sudah ada memerlukan upaya untuk mengembalikan peran dan fungsinya untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Selain itu keberadaan tenaga perlindungan masyarakat (Linmas) dapat dimanfaatkan untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.

2. Koordinasi bidang fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan

Tantangan ke depan adalah implementasi teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan di era keterbukaan informasi, maka tantangan pengembangannya adalah bagaimana kecamatan menguatkan fasilitasi dan koordinasi lintas pelaku untuk menyediakan data sektoral kewilayahan yang akurat dan terbaru.

Peluang pengembangan ke depan perlu diprioritaskan optimalisasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Oleh karena itu tantangan sekaligus peluang pengembangannya adalah peningkatan kualifikasi sumber daya aparatur kecamatan.

3. Pelayanan Publik

Tantangan pembangunan nasional dalam RPJMN dimana seluruh daerah di Indonesia diprograman bergerak ke arah Smart City memberi tantangan khusus bagi kecamatan untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju smart kecamatan (Kecamatan cerdas). Fokus pengembangan pelayanan kurun lima tahun

ke depan adalah menuju kecamatan berstandar ISO untuk pelayanan publik.

4. Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan

Tantangan dari RPJMN 2014-2019 adalah bagaimana menguatkan partisipasi masyarakat menuju tata kelola pemerintahan yang demokratis dan menguatkan kemandirian wilayah. Tantangan pengembangan layanan kecamatan kurun 2017-2022 lebih memerlukan fokus pengembangan dalam hal isu:

- a. Partisipasi masyarakat untuk menjaga pengendalian kualitas dan kuantitas sumber lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha.
- b. Partisipasi masyarakat untuk memenuhi rasio kebutuhan sarana sanitasi lingkungan untuk mengurangi resiko dampak kesehatan dikarenakan lingkungan pemukiman yang tidak sehat.